

PARTISIPASI LEMBAGA PASANGAN DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Oleh:

Barkah Lestari

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

The purpose of this study is to investigate the participation of the counterpart institutions in the implementation of the dual system education of the vocational high schools. The study was conducted at SMKN7 Yogyakarta (The State Vocational High School #7 of Yogyakarta). The subjects were the school principal, the dual system education field coordinator, the counselor, the students, and the director as well as the instructors of the counterpart institution. The data were collected by in-depth interview and documentation sort. The data indicate that the counterpart institution has not been involved actively in the implementation of the dual system education.

key words: dual system education, vocational high school, and counterpart institution participation.

Pendahuluan

Pendekatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai pola utama penyelenggaraan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1994, merupakan salah satu upaya, untuk meningkatkan kualitas tamatan. Hal ini lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan nasional umumnya dan kebutuhan tenaga kerja pada khususnya. Jika dikaji mendalam pendekatan PSG merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari kebijakan *link and match* yang berlaku pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia.

Lembaga yang sangat menentukan terlaksananya pendidikan dengan pendekatan PSG adalah dunia usaha khususnya dunia industri. Pendekatan PSG hanya mungkin terlaksana, apabila ada kesediaan dan kemauan dunia industri untuk menjadi mitra SMK. Adanya kerjasama antar sekolah dan dunia industri diharapkan pendidikan memiliki relevansi dengan dunia kerja. Namun demikian pihak industri masih sangat sedikit yang tahu dan mau menjadi mitra sekolah-sekolah kejuruan, untuk dijadikan tepat magang siswa sekolah-sekolah kejuruan tersebut. Hal ini terlihat adanya siswa SMK yang mendapat kesulitan mencari tempat praktik. Untuk itulah keterbukaan dan kesadaran dunia usaha untuk berpartisipasi perlu ditumbuhkan. Berkaitan dengan partisipasi dunia usaha, perlu dimotivasi agar mereka mau berperan serta secara aktif. Peran serta dunia usaha terhadap PSG diharapkan sebagai peran serta yang swakarsa, karena di dalamnya terkandung makna atas kesadaran sendiri.

Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, kebijaksanaan PSG secara bertahap telah dimulai sejak tahun ajaran 1994/1995 pada sejumlah SMK tertentu yang ditunjuk. Jumlah SMK yang ditetapkan untuk melaksanakan PSG pada tahun ajaran 1994/1995 sebanyak 247 SMK dan tahun ajaran 1995/1996 akan ditingkatkan menjadi 500 SMK yang tersebar seluruh di wilayah Indonesia (Kedaulatan Rakyat, 1995)

Pada Pendekatan PSG yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan adalah sekolah dan dunia usaha/dunia industri. Sekolah bertanggung jawab untuk mendidik siswa agar menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar kejuruan, sedangkan dunia usaha/dunia industri bertanggung jawab membentuk siswa memiliki keahlian-keahlian tertentu sebagai bidang profesinya.

Pelaksanaan pendekatan PSG memerlukan kerja sama yang sangat erat antara institusi pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri. Hal ini membutuhkan dukungan yang kuat dan keterlibatan dari banyak pihak, yaitu KADIN, assosiasi perusahaan, assosiasi profesi, organisasi pekerja dan lembaga pemerintahan lainnya seperti departemen tenaga kerja, departemen perindustrian, departemen perdagangan, departemen keuangan dan sebagainya.

Tujuan Penyelenggaraan PSG adalah: (1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kualitas profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. (2) Memperkokoh *link and match* antar sekolah dan dunia kerja. (3) Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional. (4) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (Depdikbud, 1994:8). Dalam hal ini pihak sekolah dituntut untuk bekerja sama dengan dunia usaha dalam mewujudkan PSG.

Agar tujuan pendidikan tersebut di atas dapat tercapai dengan baik, maka dalam melaksanakan PSG perlu diperhatikan prinsip-prinsip PSG, yaitu: (1) Menggunakan tempat kerja dan kegiatan masyarakat sebagai lingkungan pembelajaran. (2) Mengkaitkan pengalaman kerja dengan pembelajaran akademik dan (3) Memberikan peran ganda sebagai siswa yang sedang belajar (Halminton, 1990:12). Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ciri PSG adalah pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua tempat yaitu di sekolah dan di dunia usaha. Untuk itu partisipasi dunia usaha sebagai lembaga pasangan sangat diperlukan dalam pelaksanaan PSG.

Soegardo dan Sudarno (1976:20) menyatakan bahwa "partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang

berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya". Pendapat lain, Faqence (1977:19) menyatakan bahwa "partisipasi merupakan keterlibatan dalam perencanaan dan penyampaian kebi-jakan". Davis dan Newstrom (1985:137) menjelaskan bahwa "dalam partisipasi terdapat tiga unsur penting, yaitu adanya keterlibatan mental emosional, kontribusi dan tanggung jawab", selanjutnya Pidarto (1988:198) menyebutkan "partisipasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan kontrol".

Lebih lanjut Cohen dan Up Hoff (1977) menyatakan bahwa yang dimaksud partisipasi aktif adalah partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan program-program dengan berbagai kontribusinya, keterlibatan dalam pemanfaatan dan keterkaitan usaha menilai programnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam partisipasi ada beberapa aspek penting yang terlibat yaitu: (a) keterlibatan mental dan emosi, (b) kesediaan untuk berkontribusi dalam rangka penyampaian tujuan dan (c) perasaan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Berkenaan dengan partisipasi Sewel dan Coppock 1977 telah mengembangkan teori partisipasi masyarakat. Dalam teori ini strategi untuk meningkatkan partisipasi ditempuh dengan urutan kerja sebagai berikut: langkah awal yang dilakukan sebelum menentukan kebijakan adalah membuat rancangan kebijakan atau para ahli, menginformasikan isi rancangan tersebut ke masyarakat dan menampung ide yang relevan, serta memadukan antara pendapat masyarakat dengan perencanaan. Setelah melalui berbagai pertimbangan kemudian dibuat kebijakan baru. Pada prinsipnya teori ini menekankan pentingnya melibatkan pihak lain dalam menyusun suatu kebijakan. Keterlibatan pihak lain dimulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

Wujud dan jenis partisipasi masyarakat dan dunia usaha/dunia industri terhadap pendidikan akan berbeda, bergantung pada

jenis dan jenjang pendidikan yang dibantu. Pada jenjang pendidikan dasar misalnya wujud partisipasi masyarakat dan dunia industri dapat berupa sumbangan bagi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan seperti gedung sekolah, peralatan pendidikan dan buku-buku teks, serta untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan. Wujud lainnya dapat berupa sumbangan pemikiran untuk perbaikan sistem belajar mengajar dan pengelolaan sekolah. Untuk pendidikan kejuruan partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan berupa uang sekolah, tetapi juga dalam bentuk penyediaan tempat praktik.

Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Pidarto, 1988: 99) yaitu: (1) menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan, (b) bersedia datang ke lembaga pendidikan bila diundang, (c) ikut berdiskusi memecahkan masalah pendidikan seperti keuangan, sarana, kegiatan dan sebagainya, (d) membantu fasilitas-fasilitas belajar yang diperlukan lembaga dalam memajukan proses belajar mengajar, (e) meminjami tenaga pelatih dan narasumber bila ditunjuk, (f) menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar di masyarakat, (g) bersedia memberi bantuan dana secara cuma-cuma, dan (h) mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan dan ikut mengontrol jalannya pendidikan. Dari contoh partisipasi tersebut nampak perlu adanya usaha dari masyarakat sendiri untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Lebih lanjut Djoyonegoro (1994) mengatakan bahwa partisipasi dunia usaha untuk merealisasikan PSG pada SMK, dilakukan secara integratif dengan melibatkan lembaga pasangan dalam proses kegiatan PSG. Ini dapat dilakukan dengan keaktifannya untuk menghadiri pertemuan dengan sekolah, keikutsertaannya dalam membantu Majelis Sekolah, unit produksi, tim penguji profesi, instruktur dan keikutsertaan dalam kepanitiaan PSG.

Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Dalam pengambilan data di lapangan peneliti secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang terlibat, dan berusaha memahami apa yang terjadi dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif naturalistik bermaksud memahami peristiwa atas dasar pemahaman dari orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Menurut Bogdan dan Biklen (1990) dan Nasution (1988) menyatakan bahwa penelitian ini bercirikan: sumber data merupakan situasi yang wajar, peneliti sebagai instrumen utama, sangat deskriptif, mementingkan proses maupun produk, mencari makna, mengutamakan perspektif *emic*, adanya verifikasi dan analisis data dilaksanakan sejak awal penelitian. Proses pelaksanaan penelitian mendasarkan pada tiga aspek yaitu aspek pelaku, aktivitas dan tempat. Aspek pelaku yaitu jaringan informasi yang terkait dengan pelaksanaan PSG. Aspek aktivitas yaitu kegiatan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan PSG. Aspek tempat yaitu tempat yang digunakan untuk melaksanakan PSG.

Sebagai informan adalah pimpinan dan istruktur dunia usaha, kepala sekolah, koordinator pelaksanaan PSG, guru pembimbing dan siswa peserta PSG. Untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti menggunakan tiga macam metode yaitu: metode pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode pengamatan dan wawancara mendalam merupakan metode utama, sedangkan metode dokumentasi merupakan metode pendukung dalam proses pengumpulan informasi penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini diupayakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data penelitian, sehingga hasil penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Seperti diung-

kapkan Pincolin dan Guba yang dikutip Lexy Moleong (1993) bahwa keabsahan data terletak pada derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Dalam penelitian ini derajat kepercayaan dilakukan dengan perpanjangan waktu penelitian dalam rangka menggali data di lapangan, melaksanakan uji triangulasi, analisis kasus negatif dan pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pasangan belum melibatkan diri secara aktif dalam berbagai peran untuk mendukung pelaksanaan PSG. Seperti pada tahap perencanaan, pihak lembaga pasangan belum menunjukkan adanya keterlibatan. Kegiatan pemetaan jenis pekerjaan semestinya menjadi tanggung jawab lembaga pasangan, namun pekerjaan pada bidang perencanaan ini masih banyak dilakukan oleh guru pembimbing. Seperti pernyataan An, "*kalau kami nunggu bekerja dari dunia usaha atau dunia industri, bisa-bisa perencanaan ini tidak beres-beres.*"

Pernyataan An di atas, juga diakui oleh WD bahwa pihaknya sebagai dunia usaha tidak dapat berperan banyak dalam memberikan masukan-masukan perencanaan pembelajaran. Hal ini karena adanya keterbatasan pihak dunia usaha, terutama kesempatan waktu dan kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan sekolah. Di samping itu kegiatan pada dunia usaha cukup padat sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk selesainya kegiatan tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanggapan dan kesadaran lembaga pasangan dalam hal ini pihak dunia usaha masih rendah. Oleh karenanya, kegiatan perencanaan sebagai bagian dari PSG semata-mata menjadi tanggung jawab pihak SMK.

Keterlibatan lembaga pasangan dalam penyediaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari peran penting lembaga pasangan dalam

mendukung pelaksanaan PSG. Hal ini nampak pada pemenuhan sarana prasarana bagi siswa peserta PSG, terutama yang melaksanakan praktik di dunia usaha dan dunia industri.

Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga pasangan dalam menyediakan sarana prasarana masih sangat rendah. Pada umumnya, lembaga pasangan belum menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk melaksanakan praktik PSG bagi para peserta PSG. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan praktik PSG telah tersedia di tempat praktik, namun tidak semata-mata untuk pelaksanaan praktik kerja, tetapi sebagai kebutuhan lembaga pasangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Partisipasi lembaga pasangan yang dirasa penting bagi pelaksanaan praktik PSG, juga terlihat dalam keterlibatannya untuk membantu biaya pelaksanaan praktik. Namun lembaga pasangan dalam pembiayaan tidak dilakukan secara langsung. Dalam arti bahwa lembaga pasangan tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak sekolah untuk membantu anggaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan PSG.

Data penelitian menunjukkan bahwa lembaga pasangan telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan biaya, terutama seluruh biaya operasional pada saat praktik di lembaga pasangan. Lembaga pasangan juga tidak memungut biaya kepada pihak sekolah maupun para siswa dalam kaitan pelaksanaan praktik PSG. Bahkan, sebagian lembaga pasangan terutama dari pihak swasta memberikan sejumlah uang kepada para peserta praktik PSG untuk membantu biaya perjalanan.

Pemberian uang transport oleh lembaga pasangan dilakukan pada waktu sebelum perekonomian dilanda krisis. Sementara, dalam situasi krisis ekonomi seperti saat penelitian ini dilakukan, beberapa lembaga pasangan tidak lagi memberikan sejumlah uang kepada peserta praktik PSG. Seperti penuturan Ks yang menyatakan "*untuk siswa kami yang praktik, biasanya diberi uang tapi sekarang tidak*". Beberapa lembaga

pasangan yang dicontohkan Ks, misalnya Mirota Kampus semula memberikan uang tiga puluh ribu rupiah selama praktik, sekarang hanya diberi *voucher* sebesar Rp. 5.500,-. Kemudian contoh lain di Gardena semula diberi dua puluh ribu rupiah per hari, selama krisis hanya diberi *voucher* sebesar lima ribu lima ratus rupiah selama praktik. Bahkan seperti di Kanwil Kehakiman yang semula diberi uang sebesar dua puluh ribu rupiah selama praktik, sekarang tidak diberi sama sekali. Kenyataan ini juga terjadi di Koperasi Lumbang Cemara dan Kantor Tata Usaha Program Diploma III UII, masing-masing besarnya Rp. 50.000,-.

Keadaan ekonomi yang mengalami krisis ternyata berdampak kurang mendukung bagi pelaksanaan praktik PSG. Hal ini terjadi terutama kemudahan lembaga pasangan tertentu untuk memberikan biaya langsung kepada siswa dalam membantu biaya perjalanan mereka. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga pasangan tetap memberikan peran serta yang baik dalam mendukung biaya pelaksanaan praktik PSG, yaitu biaya operasional yang digunakan untuk pelaksanaan praktik. Ini berarti terdapat kerjasama yang baik antara lembaga pasangan dengan pihak SMK 7 Negeri Yogyakarta.

Keterlibatan lembaga pasangan dalam pelaksanaan praktik PSG, menentukan berhasil atau tidaknya seluruh tahapan dalam praktik PSG di lembaga pasangan. Hal ini karena kegiatan praktik atau pelatihan PSG lebih banyak dilakukan di lembaga pasangan. Oleh karena itu lembaga pasangan berpartisipasi mulai dari kesanggupan menerima siswa praktik, menyediakan tempat praktik, mendampingi dan memberikan layanan bimbingan praktik kerja serta melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan praktik kerja.

Data penelitian menunjukkan bahwa partisipasi lembaga pasangan dalam pelaksanaan praktik PSG masih bersifat pasif. Dalam arti bahwa lembaga pasangan masih terbatas untuk bersikap menerima dan menunggu inisiatif dari pihak sekolah dalam

hubungannya dengan pelaksanaan PSG. Misalnya, dalam penerimaan siswa praktik, lebih bersifat menunggu permintaan sekolah. Apabila pihak sekolah meminta lembaga pasangan sebagai tempat praktik, maka lembaga pasangan tinggal menerima permintaan tersebut. Sementara apabila pihak sekolah tidak mengajukan permintaan kepada lembaga pasangan untuk digunakan sebagai tempat praktik, maka lembaga pasangan bersifat pasif. Lembaga pasangan tidak aktif untuk menyediakan diri sebagai tempat pelaksanaan praktik PSG.

Kenyataan di atas, seperti diungkapkan oleh An: "*kami aktif nyari tempat praktik, bahkan kalau kami terlambat mengantar surat permohonan, maka sekolah tidak bisa menggunakan lembaga pasangan itu untuk praktik, meskipun sebelumnya sudah kita pesan*". Pernyataan An ini juga dibenarkan oleh Sd bahwa pihaknya tetap harus aktif mencari lembaga pasangan agar bisa digunakan sebagai tempat praktik. Ini disadari oleh pihak sekolah yang merasa membutuhkan lembaga pasangan sebagai mitra dalam pelaksanaan praktik PSG. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif dalam melaksanakan praktik PSG di lembaga pasangan lebih banyak dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan kata lain partisipasi lembaga pasangan dalam pelaksanaan praktik PSG terbatas pada sikap menerima permintaan pihak sekolah serta berkonsekuensi untuk membantu teknik pelaksanaan praktik.

Gambaran di atas, pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi lembaga pasangan dalam menyediakan tempat praktik bagi siswa dalam pelaksanaan PSG. Namun tempat untuk melakukan praktik kerja di lembaga pasangan, ditempatkan bersama-sama dengan tempat kerja karyawan. Jadi lembaga pasangan tidak menyediakan tempat kerja khusus yang digunakan untuk melakukan praktik kerja bagi peserta PSG.

Lembaga pasangan merasa telah berperan dalam pelaksanaan PSG, melalui kesediaannya untuk menerima siswa yang akan melakukan praktik kerja di lembaganya. Dalam hal ini, lembaga pasangan tidak dibebani suatu kewajiban untuk menerima siswa praktik agar melakukan praktik di tempatnya. Apalagi, sampai pada kewajiban lembaga pasangan menyediakan tempat khusus untuk pelaksanaan praktik PSG, bukan proporsi tugas lembaga.

Peran serta lembaga pasangan dalam mendukung pelaksanaan praktik PSG juga terlihat pada keterlibatan lembaga pasangan dalam penempatan lulusan. Pada akhir kegiatan PSG, lembaga pasangan diharapkan mampu membantu mencarikan lapangan pekerjaan bagi lulusannya. Hal ini karena lembaga pasangan sebagai tempat praktik kerja mengetahui keadaan siswa peserta PSG berkaitan dengan praktik kerja dan pekerjaan yang dilakukan di lembaganya. Di samping itu, lembaga pasangan juga mempunyai lapangan pekerjaan yang mampu menampung beberapa lulusan PSG.

Kenyataan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lembaga pasangan ataupun dunia usaha lain yang memesan lulusan SMK untuk dapat bekerja pada lembaga tersebut. Padahal lembaga atau dunia usaha yang dimaksud bukan sebagai lembaga pasangan dalam melaksanakan praktik PSG. Namun jumlah lulusan yang dapat disalurkan melalui bursa kerja seperti ini sangat terbatas. Demikian pula, peran serta lembaga pasangan dalam mencarikan tempat kerja bagi lulusan peserta PSG sangat terbatas. Menurut penuturan An, hal ini menggambarkan bahwa lembaga pasangan dalam merekrut tenaga kerja atau pegawai baru dilakukan secara prosedural. Artinya para peserta diseleksi melalui tes dan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Misalnya, ada cara *rekrutment* yang tidak prosedural semata-mata atas jasa baik dari pihak

tertentu. Kenyataan ini membuktikan bahwa lembaga pasangan belum banyak berpartisipasi dalam menempatkan lulusan PSG pada dunia kerja.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasannya yang dipaparkan pada bagian di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Lembaga pasangan merupakan bagian dari pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan PSG. Peran penting lembaga pasangan berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam rangkaian proses pendidikan.

Data penelitian yang ada menunjukkan bahwa lembaga pasangan belum melibatkan diri secara aktif dalam berbagai peran untuk mendukung pelaksanaan PSG. Peran tersebut barua pada tahapan penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, pelaksanaan, dan penyediaan tempat praktik.

Daftar Pustaka

- Bogdan, Robert C., Biklen. San Knopp (1990). *Qualitative research for education: an introduction to theory and methods*. Alih Bahasa Munandir. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Cohen, Arthur A, & Uphoff, Norman.T. (1997) *Feasibility and aplication of rural development participation: A state of the art paper*. Rural Development Committee Center For International Studies Cornel University.
- Davis K. & Newstrom, J.W. (1985). *Human behavior at work organizational behavior*. New York: Mc Graw Hill Inc.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994). *Konsep PSG, pendidikan menengah kejuruan di Indonesia*. Jakarta.
- Djojonegoro, Wardiman. (1994). "Meningkatkan partisipasi masyarakat dan industri dalam dunia pendidikan. Pengarahan Menteri P&K dalam rangka *Seminar National tentang penyediaan SDM yang berkualitas dalam PJP II*. Semarang, Juli 12 - 13.
- Faqence, M. (1977). *Citizen participation in palming*, New York: Pergamons Press.
- Halminton, Stephen, F. (1990). *Apprenticeship for adulthood: Preparing youth for the future*. New York: Macmillan. Inc.
- Kedaulatan rakyat (1993, November 9).
- Made Pidarto (1988). *Manajemen pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moleong Lexy J. (1993). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1988). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Republika. (1977, Maret 13)

Partisipasi Lembaga Pasangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda
di Sekolah Menengah Kejuruan

Sewel, W.R. Derrick, and Coppock. J.T. (1977). *Public participation in planning*. London: New York, Sydney, Toronto.

Soegardo, Sudarno (1976), *Ensiklopedia pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.

Soegardo, Sudarno (1976), *Ensiklopedia pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.

Soegardo, Sudarno (1976), *Ensiklopedia pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.

Soegardo, Sudarno (1976), *Ensiklopedia pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.

Cohen, Arthur A. & Uphoff, Norman T. (1991). *Application of rural development participation: A case study paper*. Rural Development Committee Center for International Studies Cornell University.

Davis, K. & Newstrom, J.W. (1985). *Human behavior in organizations*. New York: McGraw-Hill Inc.

STUDI KASUS: PERAN LEMBAGA PASANGAN DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Disusun oleh:
N. Soegardo
FKIP Unswagati, Moch. Soedji, Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga pasangan dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda di sekolah menengah kejuruan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pasangan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sistem ganda di sekolah menengah kejuruan. Peran tersebut meliputi: (1) sebagai mitra dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan sistem ganda; (2) sebagai sumber informasi dan dukungan teknis; (3) sebagai mitra dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan (4) sebagai mitra dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Kata Kunci: lembaga pasangan, pendidikan sistem ganda, sekolah menengah kejuruan.

1. PENDAHULUAN
Pendidikan sistem ganda merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan sistem ganda dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pasangan sebagai mitra dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan sistem ganda.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif.